

Studi Komparasi Aspek Feminin Dalam Kebijakan Luar Negeri Margaret Thatcher Dan Theresa May

ABSTRAK

Margaret Thatcher dan Theresa May adalah Perdana Menteri Inggris pada dua abad berbeda namun memiliki serangkaian persamaan yang membuat masyarakat internasional membandingkan aspek – aspek pemerintahan mereka. Perbandingan antara Margaret Thatcher dan Theresa May utamanya dipicu oleh kesamaan gender mereka sebagai perempuan yang memiliki kekuasaan besar di peta sistem internasional termasuk menjalankan mandat sebagai penghubung Inggris dengan sistem internasional melalui Kebijakan Luar Negeri mereka. Meskipun keduanya memiliki banyak persamaan latar belakang, Thatcher dan May memiliki aspek kepemimpinan yang tidak bisa disamakan begitu saja disebabkan oleh banyaknya perbedaan keadaan yang mereka hadapi pada saat era kepemimpinannya baik faktor internal maupun eksternal. Analisis berbasis gender yang mendeterminasi aspek maskulin dan feminin terhadap Doktrin Kebijakan Luar Negeri Margaret Thatcher dan Theresa May kemudian menjadi menarik untuk membuktikan apakah gender mereka berperan dan berhubungan dengan kebijakan – kebijakan yang mereka dikeluarkan. Berdasarkan data – data yang diperoleh, Penelitian ini menemukan bahwa Thatcher dan May menggunakan aspek maskulin dan feminin dalam Doktrin Kebijakan Luar Negeri mereka. Thatcher dan May memiliki proporsi aspek feminin dan maskulin yang berbeda. Keduanya juga memiliki cara yang berbeda dalam menggunakan aspek feminin dan maskulin dalam Kebijakan Luar Negeri mereka.

Kata Kunci : Margaret Thatcher, Theresa May, Doktrin Kebijakan Luar Negeri, Maskulin, Feminin, Gender, Feminisme

Margaret Thatcher and Theresa May are British Prime Ministers in two different centuries but have a series of similarities that make the international community compare aspects of their governance. The comparison between Margaret Thatcher and Theresa May was mainly triggered by their gender equality as women who had great power on the map of the international system including carrying out the mandate as the bridge of Britain to the international system through their Foreign Policies. Although both have many similarities in background, Thatcher and May have aspects of leadership that cannot be equated just because of the many different conditions they faced during the era of leadership, both internal and external. Gender-based analysis that determines the masculine and feminine aspects of Margaret Thatcher and Theresa May's Foreign Policy Doctrine then becomes interesting to prove whether their gender plays a role and relates to the policies they issued. Based on the data obtained, this study found that Thatcher and May used masculine and feminine aspects in their Foreign Policy Doctrine. Thatcher and May have different proportions of feminine and masculine aspects. Both also have different ways of using feminine and masculine aspects in their Foreign Policy.

Keywords : Margaret Thatcher, Theresa May, Foreign Policy Doctrine, Masculine, Feminine, Gender, Feminism

Margaret Thatcher menjabat sebagai ketua dari Partai Konservatif Inggris pada tahun 1975 sampai tahun 1990¹. Lebih lanjut, Thatcher terpilih menjadi Perdana Menteri perempuan pertaa di Inggris pada tahun 1979. Thatcher memimpin Inggris selama 11 tahun dan menjadi periode kekuasaan terlama di parlemen Inggris selama 150 tahun yang terakhir atau di periode modern parlemen Inggris. ². Margaret Thatcher sebagai Perdana Menteri Inggris juga menorehkan citra sebagai salah satu Perdana Menteri paling kontroversial di Inggris maupun dalam skala global. Memasuki tahun 2016, Theresa May, seorang wanita asal Sussex daerah Selatan Inggris menjadi Perdana Menteri Inggris setelah David Cameron. Theresa May yang memegang posisi terkuat di parlemen Inggris tersebut mengindikasikan pencapaian Theresa May sebagai wanita kedua setelah Margaret Thatcher yang memegang posisi Perdana Menteri dalam sejarah Inggris.

Terpilihnya May menimbulkan banyak tanggapan dari banyak pihak meliputi pihak pers, dalam parlemen Inggris, dan masyarakat domestik Inggris maupun masyarakat internasional yang menyamakan dan membandingkan antara Theresa May dan Margaret Thatcher. Terdapat banyak kesamaan yang disampaikan. Pertama, kesamaan dari asal – usul mereka, keduanya adalah Tories yaitu pendukung dan pejabat tinggi Partai Konservatif Inggris. Margaret Thatcher dalam parlemen Inggris mulai aktif pada tahun 1959 sebagai MP atau Member of Parliament di Finchley dan Theresa May menjadi MP Maidenhead dari Partai Konservatif Inggris pada tahun 1997 . Thatcher dan May sama – sama bersasal dari kelas sosial menengah, Thatcher dan May memiliki gelar perguruan tinggi dari Universitas Oxford. Thatcher dan May menjadi Perdana Menteri di umur yang berdekatan yaitu umur 50-an. Thatcher dan May dalam riwayat karir mereka memiliki posisi dalam pemerintahan Inggris sebagai menteri sebelum keduanya menaiki jabatan sebagai Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher menjadi Menteri Pendidikan Inggris pada tahun 1970. Jabatan tersebut dipegang Thatcher selama tiga tahun dan Theresa May memiliki jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri Inggris pada tahun 2010 sampai 2016, Periode tersebut menjadi rekor periode terlama pada posisi tersebut .

Kedua, Thatcher dan May memiliki kesamaan pada riwayat karir politik. Thatcher dan May sama – sama meraih kegagalan sejumlah dua kali pada pemilihan ketua Partai Konservatif Inggris dan keduanya berhasil memenangkan pemilihan umum untuk memimpin Partai Konservatif Inggris secara telak setelah itu. Saat pemilihan umum Inggris tahun 1979, Partai Konservatif yang berada dalam pimpinan Margaret Thatcher berhasil memenangkan 43% suara . Theresa May, meraih jabatan sebagai Perdana Menteri Inggris setelah keputusan mundurnya Perdana Menteri Inggris sebelumnya yaitu David Cameron pada bulan Juni tahun 2016. Thatcher dan May dilihat dari kepemimpinan mereka sering disamakan karena kesamaan gaya kepemimpinan mereka yang dianggap tegas oleh masyarakat Inggris, Thatcher mendapat julukan yang terkenal The Iron Lady atau perempuan sekuat besi, sedangkan masyarakat Inggris memberi julukan kepada May sebagai The Ice Maiden atau perempuan yang dingin dan tegas.

¹Katz, Ariel. 2012. *Margaret Thatcher, Golda Meir, and Indira Gandhi's Actions and Rhetoric Regarding Feminism and Gender During Their Ascent to Power*. CMC Senior Theses. Paper 518.

²Moore, Chris. 2013. *Margaret Thatcher: The Authorized Biography*. London : Allen Lane

Selanjutnya, Perbandingan yang menjadi fokus penulis adalah dari segi Kebijakan Luar Negeri dari era Thatcher dan Era May. Secara foreign affairs kesamaan May dan Thatcher adalah keduanya memegang jabatan pada saat Inggris dan dunia diselubungi krisis dari berbagai isu – isu yang esensial secara domestik atau internasional. Margaret Thatcher dan Theresa May memiliki Doktrin Kebijakan Luar Negeri yang fokus pada visi pengerahan kekuatan Inggris di dunia dan bekerjasama dalam menjawab isu - isu internasional.

Lebih lanjut, dari pemaparan diatas justifikasi yang menjadi pemicu pembandingan yang paling signifikan antara Margaret Thatcher dan Theresa May adalah gender mereka. Theresa May merupakan Perdana Menteri perempuan kedua setelah Thatcher. Timbul urgensi untuk membawa isu gender dalam hubungan internasional khususnya bagaimana gender berperan dalam Doktrin Kebijakan Luar Negeri dan dalam kasus ini penting untuk dianalisis seberapa jauh sebenarnya gender mempengaruhi Doktrin Kebijakan Luar Negeri Margaret Thatcher dan Theresa May sebagai perempuan merupakan suatu hal yang esensial dalam memegang kekuasaan tinggi di dunia dan berhubungan dengan negara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hubungan dan perbandingan pengaruh gender antara Doktrin Kebijakan Luar Negeri khususnya isu keamanan dan kerjasama internasional Margaret Thatcher dan Theresa May.

Kebijakan Luar Negeri Margaret Thatcher dan Theresa May

Doktrin Kebijakan Luar Negeri Thatcher berkaitan dengan *Thatcherism*. *Thatcherism* adalah serangkaian kebijakan ekonomi, politik, dan sosial baik domestik maupun luar negeri di bawah pemerintahan Margaret Thatcher sebagai Perdana Menteri Inggris tahun 1979 sampai tahun 1990 yang memiliki prinsip dan nilai sesuai perspektif Margaret Thatcher yang mengutamakan konservatisme, keynesianisme, nasionalisme, Victorianisme yaitu nilai – nilai yang berkembang di adan 17 dan 18 di Inggris yang mengutamakan kehormatan dan kepercayaan diri. Lalu victorianisme meliputi aspek moralitas, represif, kesopanan dan bersifat *old-fashioned* atau kuno sehingga nilai dalam victorianisme cenderung tidak menghargai kesetaraan atau perjunagan gender perempuan³. Lebih lanjut, *thatcherisme* juga dipengaruhi populisme yaitu nilai yang memperjuangkan kepentingan warga negara biasa atau yang bukan pejabat⁴. Konservatisme juga menjadi prinsip utama khususnya bagi Thatcher dan May untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan negara pada periode tertentu. Dalam politik luar negeri, *Thatcherism* berkaitan dengan visi *A strong Britain in a free world* yang mengindikasikan pengerahan kekuatan UK memegang posisi vital dalam politik internasional⁵. *Thatcherism* membuktikan asumsi analisis doktrin kebijakan luar negeri level individu bahwa seorang pemimpin akan bertindak utamanya berdasarkan keyakinan yang dipegangnya.

³ Oxford Reference. 2008. Oxford Encyclopedia for The Modern World. Oxford : Oxford University Press.

⁴ Lawson, Nigel. 1992. *The View From No. 11: Memoirs of a Tory Radical*. London: Bantam.

⁵ BRITPOLITICS. Tt. *Thatcherism* dalam <http://www.britpolitics.co.uk/thatcherism> (diakses pada 23 April 2017)

Aspek keamanan dalam pemerintahan Thatcher menjumpai tantangan besar karena berada dalam ketegangan Perang Dingin yang dimainkan Soviet dan Amerika Serikat (AS) lalu Thatcher juga dihadapi Perang Falkland dimana keutuhan wilayah kedaulatan Inggris di kepulauan Falkland (Kepulauan di Selatan Amerika Latin) terancam oleh Argentina. Kemudian pada kerjasama internasional, Thatcher membawa Inggris menjadi sahabat dekat mantan koloninya yaitu Amerika Serikat dan Thatcher dihadapkan tantangan kerjasama multilateral ketika *European Union* (EU) terbentuk di Eropa.

Secara umum Doktrin Margaret Thatcher dalam memimpin Inggris selama Perang Dingin tidak dapat dipisahkan terkait visi *Atlanticist* yaitu hubungan erat dengan aliansi keamanan NATO dan Amerika⁶. *Reasoning* atau alasan rasional Thatcher untuk mendukung visi kerjasama jalur Atlantik disebabkan pada saat Perang Dingin kebijakan yang dilaksanakan jarang yang berada diluar agenda NATO. Thatcher dalam Perang Dingin mengeluarkan kebijakan pertahanan dan keamanan dengan tujuan utama untuk mempertahankan keadaan. Thatcher membawa militer Inggris untuk berjuang mempertahankan daerah NATO dari serangan Soviet. Thatcher juga menunjukkan aspek multilateralisme pada kebijakan Perang Dingin ditunjukkan dengan NATO seperti yang dibahas sebelumnya dan Perserikatan Bangsa – Bangsa. Thatcher dengan multilateralisme berhasil untuk menjaga kekuatan dan pengaruhnya selama Perang Dingin berlangsung. Hal tersebut diraih Thatcher dengan pengerahan militer yang efektif dan terhormat karena memegang peran esensial dalam agenda NATO⁷. Margaret Thatcher memegang jabatan sepuluh tahun sebelum berakhirnya Perang Dingin, dalam periode tersebut Thatcher juga secara intensif mewujudkan doktrin *Thatcherism* dengan mengeluarkan banyak kebijakan yang mengindikasikan prinsip keynesianisme dan konservatisme seperti pada isu ekonomi yaitu inflasi pada tahun 1970-an. *White Paper* Inggris pada tahun 1981 mengindikasikan bahwa Thatcher memotong anggaran angkatan bersenjata Inggris namun tidak signifikan. Thatcher lebih lanjut mengindikasikan pemilihan visi *Atlanticist* dengan intensitas hubungan bilateral Inggris dengan Amerika Serikat dibawah pimpinan Reagan Thatcher dan Reagan mempunyai banyak kesamaan prinsip dalam isu domestik atau internasional. Thatcher secara spesifik cocok dengan Reagan karena prinsip anti-komunis yang kuat. Hal tersebut membuat Thatcher semakin dihormati di Washington⁸.

Strategi Thatcher dalam menjawab perang Falkland menjadi operasi militer yang paling ambisius oleh angkatan bersenjata Inggris di akhir abad 20⁹. Hal tersebut adalah bukti dari asumsi analisis Doktrin Kebijakan Luar Negeri level individu dimana Thatcher dalam perang ini bersifat adaptif dan tegas menangani tekanan atau isu yang menyerang khususnya isu esensial seperti kedaulatan. Sebenarnya kekuatan militer dari Inggris dan Argentina tidak siap saat mereka memasuki perang. Namun

⁶ Miskimmon, Alister.2004. “Continuity in the Face of Upheaval—British Strategic Culture and the Impact of the Blair Government”, *European Security*, 13 (3): 273-299.

⁷ *Ibid*

⁸ Berlinski, Claire. *There is No Alternative: Why Margaret Thatcher Matters*. New York: Basic Books, 2008. 275-8.

⁹ Sondhaus, Lawrence .2006. “Europe”, dalam *Strategic Culture and Ways of War*. Oxon: Routledge. Ch. 2 (Europe).

pada akhirnya Thatcher membuktikan bahwa Inggris lebih superior dalam militer dibanding Argentina yang tidak memiliki strategi dan persenjataan mapan. Thatcher membuktikan bahwa Inggris mahir mengatasi masalah perang dengan *self innovation* dan improvisasi, dan menunjukkan sifat-sifat tersebut pada tingkat operasi bersama. Lalu pelatihan, persiapan, kepemimpinan, keterampilan, keberanian, dan tekad militer yang sangat baik dari pihak Inggris menjadikan Inggris unggul¹⁰. Thatcher mengutamakan tiga strategi militer yaitu mengamankan keunggulan udara, pengamanan komando konsentrasi laut, utilisasi senjata api dan mobilitas selama perang darat, dan keunggulan dalam intelijen, pengawasan, serta pengintaian dan pentingnya operasi bersama¹¹.

Kebijakan kerjasama internasional meliputi saat Uni Eropa akan dibentuk Margaret Thatcher melepas jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tahun 1990. Perang Dingin mengindikasikan bahwa Doktrin Kebijakan Luar Negeri *Thatcherism* lebih cenderung memiliki visi *Atlanticist* dibuktikan dengan *Thatcherism* juga membawa persepsi skeptis Inggris terhadap Eropa atau *Eurosepticism*. Hal tersebut dibuktikan dari Pidato Margaret Thatcher di Bruges tahun 1988 yang mengindikasikan ketidaksetujuan Thatcher dan ingin membatasi ambisi Eropa. Thatcher berkata, Untuk mencoba menekan kebangsaan dan kekuatan konsentrat di satu pusat Eropa akan sangat merusak dan akan membahayakan tujuan yang ingin Inggris capai¹².

Sebagai Perdana Menteri yang baru menjabat, Doktrin Kebijakan Luar Negeri biasanya belum terlalu menonjol dan kohesif. May yang baru menjabat selama dua tahun sebagai Perdana Menteri sehingga tentunya memiliki jam terbang yang jauh lebih kecil dari Thatcher namun isu internasional seperti *war on terrorism* dan *Brexit* memaksa May untuk menunjukkan Doktrin Kebijakan Luar Negeri-nya. Prinsip dalam Doktrin Kebijakan Luar Negeri Theresa May tentunya dipengaruhi oleh konservatisme sebagaimana Thatcher karena keduanya pemimpin Partai Konservatif yang bertanggung jawab untuk mencerminkan kepentingan partai konservatif di pemerintahan. Namun, Theresa May tetap beradaptasi dengan isu – isu yang esensial sekarang. Inggris saat ini sedang mengalami masa gejolak, di dalam dan luar negeri. Kondisi tersebut dipicu oleh gerakan politik baru di dalam dan di luar parlemen, dampak dari penghematan dan keputusan untuk meninggalkan EU berinteraksi dengan lingkungan keamanan global yang semakin kompleks. Saat ini tidak diragukan lagi merupakan situasi yang menantang

Tahun 2017 yang merupakan setahun pertama Theresa May menjabat sebagai Perdana Menteri namun Inggris telah diwarnai oleh intensitas aksi terorisme yang sangat Tinggi. Fakta tersebut membuat Inggris harus evaluasi strategi mereka dalam pencegahan dan melawan terorisme. Theresa May secara tegas mengecam aksi ekstrimisme dan terorisme. Theresa May sebagai Perdana Menteri juga menyadari bahwa Inggris butuh peningkatan strategi keamanan yang besar melawan terorisme.

¹⁰ Yanagisawa, Jun. T.t. *Military Implications of the Falklands War*. NIDS

¹¹ *Ibid*

¹² Guardian.com. 2016. *British Eurosepticism: a brief history* tersedia dalam <https://www.theguardian.com/politics/2016/feb/07/british-eurosepticism-a-brief-history> (diakses pada 7 Desember 2017)

Sebenarnya, Inggris selama ini telah mengambil bagian aktif dalam perang melawan terorisme. Spesifik ke kontra-terorisme, Inggris berkontribusi dalam kampanye militer internasional yang mengurangi ancaman teroris di Afghanistan dan membantu melatih 350.000 pasukan keamanan nasional Afghanistan yang kuat, yang sekarang memiliki tanggung jawab keamanan untuk 30 juta warga Afghanistan. Proses penyerahan keamanan ke pasukan Afghanistan dan melihat peran militer internasional berubah dari operasi tempur terkemuka untuk pelatihan, konsultasi dan bantuan¹³.

Lebih lanjut, May menganggap bahwa Inggris mengakui bahwa terorisme telah berubah, dan para ekstremis tidak terhubung melalui jaringan khas masa lalu. May mengatakan bahwa Inggris sedang mengalami "tren baru" dalam ancaman terorisme dan mengisyaratkan tindakan keras yang luas terhadap ekstremisme di negara tersebut¹⁴. May menyerukan pengkajian ulang upaya kontra-ekstremisme dan kontra-terorisme dalam sebuah pidato yang dibuat di *Downing Street* menyusul serangan teroris pada bulan Juni di London. May mengatakan untuk mengalahkan terorisme adalah mengalahkan ideologi mereka dan hal tersebut adalah salah satu tantangan besar di zaman kita, namun ideologi mereka tidak bisa dikalahkan oleh intervensi militer saja. Terorisme tidak akan dikalahkan oleh pemeliharaan operasi kontra-terorisme defensif permanen, meskipun terampilnya para pemimpin dan praktisi. May kemudian mengindikasikan strategi *cyberterrorism* karena Inggris telah diserang oleh Rusia dengan *cyberattack* di layanan publik dan May menyatakan bahwa Inggris perlu bekerja sama dengan pemerintah demokratis lainnya untuk mencapai kesepakatan internasional yang mengatur dunia maya untuk mencegah penyebaran perencanaan ekstremis dan terorisme. May menyatakan Inggris perlu melakukan semua yang Inggris bisa di dalam negeri untuk mengurangi risiko ekstremisme secara *online*¹⁵.

Theresa May sebagai Perdana Menteri juga menyadari bahwa Inggris butuh peningkatan strategi keamanan yang besar melawan terorisme. Sebenarnya, Inggris selama ini telah mengambil bagian aktif dalam perang melawan terorisme. Spesifik ke kontra-terorisme, Inggris berkontribusi dalam kampanye militer internasional yang mengurangi ancaman teroris di Afghanistan dan membantu melatih 350.000 pasukan keamanan nasional Afghanistan yang kuat, yang sekarang memiliki tanggung jawab keamanan untuk 30 juta warga Afghanistan. Proses penyerahan keamanan ke pasukan Afghanistan dan melihat peran militer internasional berubah dari operasi tempur terkemuka untuk pelatihan, konsultasi dan bantuan¹⁶.

Lebih lanjut, May menganggap bahwa Inggris mengakui bahwa terorisme telah berubah, dan para ekstremis tidak terhubung melalui jaringan khas masa lalu. May mengatakan bahwa Inggris sedang mengalami "tren baru" dalam ancaman terorisme

¹³MOD. T.t. *British Army deployment in Afghanistan* tersedia dalam <http://www.army.mod.uk/operations-deployments/22713.aspx> (diakses 11 Desember 2017).

¹⁴Samuelson, Kate. 2017. *Prime Minister Theresa May's Full Speech on the London Bridge Attack* tersedia dalam <http://time.com/4804640/london-attack-theresa-may-speech-transcript-full/> (diakses 11 Desember 2017).

¹⁵*Ibid*

¹⁶MOD. T.t. *British Army deployment in Afghanistan* tersedia dalam <http://www.army.mod.uk/operations-deployments/22713.aspx> (diakses 11 Desember 2017).

dan mengisyaratkan tindakan keras yang luas terhadap ekstremisme di negara tersebut¹⁷. May menyerukan pengkajian ulang upaya kontra-ekstremisme dan kontra-terorisme dalam sebuah pidato yang dibuat di *Downing Street* menyusul serangan teroris pada bulan Juni di London. May mengatakan untuk mengalahkan terorisme adalah mengalahkan ideologi mereka dan hal tersebut adalah salah satu tantangan besar di zaman kita, namun ideologi mereka tidak bisa dikalahkan oleh intervensi militer saja. Terorisme tidak akan dikalahkan oleh pemeliharaan operasi kontra-terorisme defensif permanen, meskipun terampilnya para pemimpin dan praktisi. May kemudian mengindikasikan strategi *cyberterrorism* karena Inggris telah diserang oleh Rusia dengan *cyberattack* di layanan publik dan May menyatakan bahwa Inggris perlu bekerja sama dengan pemerintah demokratis lainnya untuk mencapai kesepakatan internasional yang mengatur dunia maya untuk mencegah penyebaran perencanaan ekstremis dan terorisme. May menyatakan Inggris perlu melakukan semua yang Inggris bisa di dalam negeri untuk mengurangi risiko ekstremisme secara *online*¹⁸.

Brexit yang telah digambarkan akan memberi dampak signifikan bagi seluruh sektor di Inggris, sektor keamanan dan pertahanan juga kena imbasnya. Pasca *brexit* yang sangat mencerminkan *eurocepticism*, strategi keamanan dan pertahanan Theresa May utamanya tetap mengutamakan kedekatan Inggris secara multilateral dengan EU maupun negara anggotanya. Pernyataan tersebut didukung fakta bahwa May sebenarnya tidak mendukung *Brexit* dan memilih tetap di Eropa pada saat referendum. Namun, May menyatakan sejak mengambil tanggung jawab menjadi Perdana Menteri Inggris, tugas May adalah untuk menghormati hasil referendum¹⁹. May membuktikan asumsi analisis Kebijakan Luar Negeri level individu bahwa meskipun berbeda dengan persepsi diri, individu merepresentasikan sebuah negara sehingga tindakan dan pemikiran pemimpin tersebut pasti akan mewakili kepentingan nasional negaranya. Sehingga May tidak meneksplotasi persepsi pribadinya terhadap suatu isu internasional akibat faktor eksternal dalam hal ini keputusan mayoritas rakyat Inggris.

Analisis Gender dalam Kebijakan Luar Negeri Margaret Thatcher dan Theresa May

Secara individu Margaret Thatcher adalah perempuan yang dinilai maskulin oleh rakyatnya dibuktikan dengan citra kepemimpinannya yang tegas dan efektif sehingga dijuluki sebagai Iron Lady. Julukan tersebut sebenarnya menggambarkan persepsi rakyat kepada gender Margaret Thatcher. Masyarakat yang sebelumnya berharap pemimpin perempuan pertama di Inggris menonjolkan sisi feminin baik secara individu maupun dalam melakukan kepentingan pemerintahan ternyata lebih dikenal rakyatnya dengan sifat tegas dan maskulinnya. Hal tersebut membuktikan

¹⁷Samuelson, Kate. 2017. *Prime Minister Theresa May's Full Speech on the London Bridge Attack* tersedia dalam <http://time.com/4804640/london-attack-theresa-may-speech-transcript-full/> (diakses 11 Desember 2017).

¹⁸*Ibid*

¹⁹Gov.uk. 2018. *PM's statement on exiting the European Union* tersedia dalam <https://www.gov.uk/government/speeches/pms-statement-on-exiting-the-european-union-10-december-2018> (diakses pada 11 Desember 2018).

bahwa Thatcher tidak mengutamakan atau menonjolkan aspek feminitas di pemerintahannya dan Thatcher tidak sesuai dengan persepsi penstudi gender dalam pemerintahan dan hubungan internasional yang mengindikasikan pemimpin perempuan menjunjung aspek feminitas dalam pemerintahan. Thatcher tidak menganggap dirinya seorang individu maupun pemimpin yang feminis atau pejuang kaum wanita²⁰. Hanya ada sedikit bukti bahwa Thatcher memiliki ketertarikan dengan analisis feminis dan isu – isu feminis. Thatcher juga tidak mau dilihat masyarakat sebagai pemimpin dengan suatu gender tertentu namun memilih masyarakat melihat dirinya sebagai seorang individu. Thatcher tidak sering berbicara tentang masalah wanita kecuali berkaitan dengan politik partainya²¹. Thatcher juga tidak mendapat dukungan dari banyak kaum feminis. Kaum Feminis banyak yang mengindikasikan bahwa Thatcher adalah salah satu contoh paling jelas dari seorang wanita yang sukses tidak selalu berarti bahwa dia akan menjadi pemandu langkah maju bagi wanita di parlemen²²

Thatcher dalam kebijakan keamanan internasional pada Perang Dingin dan Perang Falkland membuktikan bahwa pemimpin perempuan menggunakan aspek maskulin dengan penggunaan *force* atau kekuatan sebagai alat kebijakan luar negeri, Demi meraih kedamaian dan kemenangan Thatcher tidak mau harus mengutamakan aspek feminitas dan mengurangi penggunaan kekerasan dan kekuatan militer maksimal dibuktikan dengan penjabaran strategi dan utilisasi militer pada bab sebelumnya. Aspek maskulin yang sangat kental dengan Doktrin Kebijakan Luar Negeri Thatcher dalam kedua perang besar ini membuat Thatcher tidak sesuai dengan asumsi Chyntia Enloe yang menyatakan bahwa perempuan cenderung tidak menggunakan *force* sebagai prioritas kebijakam ketika perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan luar negeri²³. Thatcher juga tidak sesuai dengan asumsi Caprioli yang menyatakan aspek feminin pemimpin perempuan terhadap kebijakan luar negeri adalah kurangnya dukungan pada penggunaan kekerasan internasional²⁴. Thatcher dalam merumuskan kebijakannya yaitu penggunaan kekuatan militer maksimal dipengaruhi fakta bahwa Thatcher berpacu untuk melaju di jalan efektif mempertahankan *status quo* di Perang Dingin dan meraih kemenangan di Perang Falkland.

Namun, Thatcher bukanlah pemimpin wanita yang sangat maskulin dalam kepemimpinannya dan sama sekali tidak menunjukkan aspek feminin. Aspek feminin juga muncul dari kepemimpinan Thatcher pada saat menghadapi Perang Dingin dan Falkland. Selama kepemimpinannya yang merupakan periode kepemimpinan terlama, Thatcher tidak pernah membawa Inggris untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri yang memulai sebuah konflik atau perang. Thatcher tidak mengutamakan

²⁰Childs, Sarah. 2013. *Thatcher's Gender Trouble: Ambivalence And The Thatcher Legacy*. London : Politics Studies Association

²¹*Ibid*

²²Freedman, Haley. 2013. *Margaret Thatcher was no feminist* teredia dalam <https://www.theguardian.com/2013/apr/09/margaret-thatcher-no-feminist> (diakses pada 16 September 2018)

²³ Enloe, C. 1990. *Bananas, Beaches And Bases: Making Feminist Sense Of International Politics*(2nd Edition). Berkeley: University of California Press

²⁴*Ibid*.

kekerasan sebagai alat utama untuk memulai suatu kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional kecuali dalam keadaan darurat seperti Perang Falkland yang dimulai secara tiba – tiba dan memaksa Thatcher untuk bertindak tegas. Thatcher juga membuktikan dirinya tidak selevel dengan perdana menteri lain yang telah beberapa kali memulai suatu konflik atau perang. Thatcher disini membuktikan asumsi feminin pada kebijakan luar negeri dari Cynthia Enloe yang menyatakan sebuah negara yang dipimpin wanita cenderung memiliki inisiasi rendah untuk memulai konflik dan perang²⁵.

Thatcher dalam pembentukan EU seperti dijabarkan dalam bab sebelumnya menunjukkan adanya aspek feminin yang terbuka pada kerjasama dan multilateralisme. Namun, Thatcher juga tidak segan untuk mengungkapkan visinya yang cenderung memihak Amerika Serikat dan menunjuka skeptisme terhadap Eropa. Thatcher disini memprihatinkan bagaimana kesejahteraan rakyat Inggris jika bergabung kepada suatu komunitas yang sangat terintegrasi dalam berbagai aspek penting seperti ekonomi. Sebagai pemimpin yang keynesianisme Thatcher memiliki perhatian yang tak terbatas kepada *gain* yang didapatkan Inggris dari EU.

Berlawanan dengan Thatcher yang tidak mengakui dirinya sebagai seorang feminis sebagaimana yang diindikasikan gambar Theresa May yang memakai kaos bertuliskan *this is what feminist looks like* atau inilah tampak seorang feminis. May secara eskplisit mengatakan bahwa dirinya adalah seorang feminis. Bahkan pers pada awal kepemimpinan May mengindikasikan bahwa May adalah Perdana Menteri paling feminis dalam sejarah Inggris²⁶. May memiliki catatan yang sangat mengesankan menyangkut perjuangan hak-hak wanita. Pada tahun 2005, May mendirikan *Women2Win* yaitu sebuah kelompok Partai Konservatif yang mendukung komitmen David Cameron untuk memilih lebih banyak wanita dari Partai Konservatif ke Parlemen. Pada tahun 2010, May menjadi Menteri Wanita dan Kesetaraan Inggris dalam *Home Office* parlemen. Jabatan tersebut membuat May menjadi wanita pertama yang bersal dari partai Konservatif untuk memegang tanggung jawab secara khusus memperjuangkan isu – isu gender dan kesetaraan di Parlemen²⁷. Aspek feminin pada Doktrin Theresa May dapat ditarik dari fakta sebagai Menteri Wanita dan Kesetaraan di Inggris, May dapat dipastikan jauh lebih terpengaruhi dan peduli pada isu – isu gender sebagai Perdana Menteri. May juga membentuk persepsi masyarakat Inggris yang berharap besar pada May sebagai Perdana Menteri yang lebih mengutamakan aspek feminin dalam mengeluarkan kebijakan domestik dan luar negeri seperti Angela Merkel di Jerman.

Dalam kebijakan keamanan melawan terorisme, May cenderung memenuhi asumsi pemimpin wanita oleh para *scholars* seperti Jill Steans, Caprioli, dan Conover yaitu May memiliki indikasi sama seperti Thatcher yaitu mengeluarkan kebijakan maskulin ketika saat darurat dalam hal ini rentetan aksi terorisme di tahun 2017. Namun, May juga berpacu pada aspek feminin untuk melakukan kerjasama

²⁵Enloe, C. 1990. *Bananas, Beaches And Bases: Making Feminist Sense Of International Politics*(2nd Edition). Berkeley: University of California Press

²⁶ Sanghani, Radika. 2016. *Is Theresa May Britain's most feminist Prime Minister ever?* tersedia dalam <https://www.telegraph.co.uk/women/politics/is-theresa-may-the-most-feminist-prime-minister-ever/> (diakses pada 26 November 2018).

²⁷*Ibid*

multilateral khususnya dengan negara esensial seperti Amerika Serikat dalam menghapus terorisme. May disini memenuhi asumsi feminis yaitu beranggapan bahwa konflik bukanlah sesuatu yang endemik dan dapat berubah dengan adanya hubungan antara negara yang sama-sama membawacita-cita *peacefulness*²⁸. May juga mengindikasikan aspek feminin pada isu ini dengan fokus pada pendekatan kooperatif dan damai dalam menjalin hubungan antar negara dan menyelesaikan isu yang menjadi perhatian dunia ini

Analisis gender terhadap Brexit menunjukkan bahwa kaum perempuan termasuk May lebih memilih Inggris tetap menjadi anggota EU. Namun, hasil referendum mengatakan bahwa Inggris harus keluar. May dalam dua tahun pemerintahannya fokus untuk memperjuangkan doktrinnya sebagai konservatis yang menuntut keuntungan bersama bagi Inggris dan Eropa. May dalam upayanya pada perjanjian Brexit mencerminkan aspek feminin melalui asumsi Conover bahwa preferensi kebijakan perempuan dipengaruhi oleh etika caring atau kepedulian dan kerjasama yang setara. Sehingga May tidak akan berhenti bernegosiasi sampai terpenuhinya prinsip kerjasama yang setara dan pemenuhan aspek keadilan antara perjanjian Inggris dan EU. May juga secara tegas menunjukkan aspek feminitas seperti penuntutan keadilan dalam hak asasi manusia dan kesejahteraan semua rakyat termasuk perempuan yang paling tepat dalam pidato – pidatonya yang dikeluarkan sebagai respon atas kritisi anggota parlemen atau masyarakat yang menjadikan May sasaran utama atas kekacauan persetujuan Brexit. Namun, May dibanding David Cameron yang menjadi perdana menteri pertama dalam isu Brexit cenderung jauh lebih kompeten dalam hal menggurangi efek Brexit bagi Inggris dibuktikan dengan Cameron yang dinilai lepas tangan, menyalahkan pihak lainnya, dan tidak setegas May dalam memperjuangkan hak dan keuntungan Inggris dalam negosiasi Brexit.

Kesimpulan

Penelitian menyimpulkan bahwa Margaret Thatcher dan Theresa May dapat diindikasikan memiliki Kebijakan Luar Negeri dengan prinsip konservatisme yang kuat yaitu panduan pada nilai – nilai tradisional dalam nasionalisme Inggris termasuk mengutamakan kekuasaan monarki Inggris. Pada era Thatcher terindikasikan pada kuatnya *Thatcherism*. Lalu, pada era Theresa May diindikasikan dengan pengaruh partai konservatif Inggris pada kebijakan – kebijakan domestik atau internasional Inggris. Thatcher dan May sama – sama memiliki visi untuk dapat menguatkan kapabilitas Inggris di sistem internasional. Thatcher dan May juga mempunyai ambisi untuk mempertahankan Inggris sebagai salah satu negara dengan *great power*. Lalu keduanya juga berprinsip adaptif, ekonomis, dan proposional. Aspek maskulin sangat kental dalam kebijakan pertahanan Thatcher dan May. Aspek pertahanan dan keamanan keduanya didominasi ambisi militer yang besar tetapi tidak melupakan efektifitas anggaran yang ekonomis dan cermat.

Thatcher dan May memiliki doktrin yang serupa namun tidak sepenuhnya sama. Keduanya tentunya berbasis pada nilai konservatisme yang diidentikan dengan tradisional dan represif. Namun, Doktrin Kebijakan Luar Negeri May bergerak dari konservatisme Thatcher dengan lebih fokus dan melibatkan negara dalam sektor -

²⁸ Steans, Jill et al., 2005. *Introduction to International Relations, Perspectives & Themes*, 3rd edition. London: Pearson. Ch.6

sektor yang menjadi isu modern dan esensial di sistem internasional saat ini. Termasuk sektor yang menjadi sektor dalam isu feminis yaitu sektor energi, pendidikan anak – anak. Pernyataan tersebut utamanya disebabkan oleh adanya faktor internal pada Thatcher dan May yaitu ajaran yang berbeda khususnya pada aspek feminin dalam diri Thatcher dan May. Thatcher pada masanya, belum ada gerakan atau ajaran feminis yang mapan. Thatcher tumbuh dalam nilai tradisional dan penuh elemen patriarki atau dominasi laki – laki. Namun, Thatcher sejatinya memiliki ambisi feminis yaitu representasi wanita di tingkat tertinggi dalam parlemen Inggris. Hal tersebut merupakan terobosan feminis Thatcher mengingat bagaimana Thatcher dibesarkan pada era yang sangat bias terhadap gender perempuan utamanya perempuan memegang kekuasaan tinggi. Thatcher membuktikan meskipun dengan nilai tradisional dan konservatif dia bisa memecahkan batasan bagi wanita di parlemen.

May memiliki latar belakang yang menjadikan dirinya sebagai seorang feminis secara terbuka. May aktif di berbagai aktivitas feminisme. May menjadi Menteri Wanita dan Kesetaraan menjadi acuan yang valid pada fakta bahwa May secara internasional menggunakan aspek feminin pada Doktrin Kebijakan Luar Negerinya dibandingkan Thatcher. May juga telah secara spesifik menggunakan pendekatan dan tujuan feminis yang lebih intensif dibandingkan Thatcher dalam kebijakan domestik maupun internasional. Sehingga meskipun pengaruh Thatcher pada perempuan lebih besar dari May. Dalam doktrin politik luar negeri May lebih menunjukkan aspek feminin yang lebih transparan dan eksplisit.

Analisis gender pada Doktrin Kebijakan Luar Negeri Margaret Thatcher dan Theresa May menunjukkan adanya asumsi gender khususnya aspek feminin pada Doktrin Kebijakan Luar Negeri mereka. Meskipun kebijakan luar negeri Margaret Thatcher dan Theresa May mengindikasikan aspek maskulin namun reasoning atau perumusan dan tujuan dari kebijakan tersebut kembali pada aspek feminin seperti pencapaian perdamaian, keamanan, dan keadilan. Sehingga aspek maskulin seperti utilisasi militer dalam skala besar lebih menjadi alat dalam eksekusi kebijakan Thatcher dan May. Margaret Thatcher cenderung jauh lebih maskulin daripada May akibat faktor kondisi internal maupun eksternal saat periode pemerintahannya daripada May. Meskipun, Thatcher tidak mengakui dirinya sebagai seorang feminis namun Thatcher tidak bisa lepas dari gendernya sebagai pemimpin wanita berpengaruh. Thatcher secara tidak langsung mengindikasikan aspek feminin selama era kepemimpinannya, May cenderung lebih menunjukkan aspek feminin dibanding Thatcher. Latar belakang feminis yang kuat dan periode abad ke-21 dengan isu internasional yang merambah ranah kajian feminisme mendukung untuk May bisa menunjukkan aspek feminin lebih intensif dari Margaret Thatcher. Margaret Thatcher cenderung juga lebih mencampurkan aspek feminin dan maskulin karena keyakinannya dan sifat pribadi yang dimiliki.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Buku

Berlinski, Claire. *There is No Alternative: Why Margaret Thatcher Matters*. New York: Basic Books, 2008. 275-8.

- Childs, Sarah. 2013. *Thatcher's Gender Trouble: Ambivalence And The Thatcher Legacy*. London : Politics Studies Association
- Enloe, C. 1990. *Bananas, Beaches And Bases: Making Feminist Sense Of International Politics*(2nd Edition). Berkeley: University of California Press.
- Katz, Ariel. 2012. *Margaret Thatcher, Golda Meir, and Indira Gandhi's Actions and Rhetoric Regarding Feminism and Gender During Their Ascent to Power*. CMC Senior Theses. Paper 518.
- Lawson, Nigel. 1992. *The View From No. 11: Memoirs of a Tory Radical*. London: Bantam.
- Miskimmon, Alister.2004. "Continuity in the Face of Upheaval—British Strategic Culture and the Impact of the Blair Government", *European Security*, 13 (3): 273-299
- Moore, Chris. 2013. *Margaret Thatcher: The Authorized Biography*. London : Allen Lane
- Oxford Reference. 2008. Oxford Encyclopedia for The Modern World. Oxford : Oxford University Press.
- Sondhaus, Lawrence .2006. "Europe", dalam *Strategic Culture and Ways of War*. Oxon: Routledge. Ch. 2 (Europe).
- Yanagisawa, Jun. T.t. *Military Implications of the Falklands War*. NIDS

Online

- BRITPOLITICS. Tt. *Thatcherism* dalam <http://www.britpolitics.co.uk/thatcherism> (diakses pada 23 April 2017).
- Freedman, Haley. 2013. *Margaret Thatcher was no feminist* tersedia dalam <https://www.theguardian.com/2013/apr/09/margaret-thatcher-no-feminist> (diakses pada 16 September 2018)
- Gov.uk. 2018. *PM's statement on exiting the European Union* tersedia dalam <https://www.gov.uk/government/speeches/pms-statement-on-exiting-the-european-union-10-december-2018> (diakses pada 11 Desember 2018).
- Guardian.com. 2016. *British Euroscepticism: a brief history* tersedia dalam <https://www.theguardian.com/politics/2016/feb/07/british-euroscepticism-a-brief-history> (diakses pada 7 Desember 2017)
- MOD. T.t. *British Army deployment in Afghanistan* tersedia dalam <http://www.army.mod.uk/operations-deployments/22713.aspx> (diakses 11 Desember 2017).
- Samuelson, Kate. 2017. *Prime Minister Theresa May's Full Speech on the London Bridge Attack* tersedia dalam <http://time.com/4804640/london-attack-theresa-may-speech-transcript-full/> (diakses 11 Desember 2017).
- Sanghani, Radika. 2016. *Is Theresa May Britain's most feminist Prime Minister ever?* tersedia dalam <https://www.telegraph.co.uk/women/politics/is-theresa-may-the-most-feminist-prime-minister-ever/> (diakses pada 26 November 2018).